

## PROSPEK PENGELOLAAN SAMPAH NON-KONVENSIONAL DI BANGKALAN

<sup>1</sup>Iriani Ismail

<sup>1</sup>Jurusan Manajemen, Universitas Trunojoyo Madura,  
Jl. Raya Telang Po Box 2 Kamal 69162  
E-mail: [iriani.ismail@yahoo.com](mailto:iriani.ismail@yahoo.com)

**Abstrak.** *Pengelolaan sampah perkotaan kecil sampai sekarang ini secara umum masih konvensional, sehingga kebutuhan akan biaya operasional serta lahan TPA tinggi. Sampah tidak lagi dapat dianggap remeh oleh pemerintah kabupaten, karena apabila tidak dikelola secara serius akan dapat menjadi "besar dan menakutkan" di kemudian hari. Pelayanan persampahan yang optimal, sudah merupakan tuntutan situasi sehingga sudah waktunya ada perubahan paradigma pengelolaan sampah. Perubahan paradigma ke arah nonkonvensional tidak serta merta meninggalkan sistem konvensional, akan tetapi bersifat melengkapi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prospek pengelolaan sampah nonkonvensional di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif rasionalistik. Teknik analisis menggunakan metode distribusi frekuensi dan deskriptif kualitatif, teknik sampling menggunakan Simple Random Sampling dengan 90 responden. Berdasarkan hasil penelitian, prospek pengelolaan sampah non konvensional dipengaruhi oleh lima aspek yaitu (1) aspek sistem teknik operasional, (2) sistem kelembagaan, (3) sistem pembiayaan, (4) sistem peraturan dan (5) peran serta masyarakat. Ditinjau dari aspek sistem teknik operasional, pengelolaan secara nonkonvensional diperlukan untuk mengatasi permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Sistem kelembagaan juga mendorong pengelolaan nonkonvensional untuk mengatasi beban kerja yang terus meningkat. Sementara sistem pembiayaan secara umum sudah tidak menjadi prioritas sehingga biaya operasional yang kecil mendorong prospek menuju pengelolaan nonkonvensional untuk mengantisipasi adanya tuntutan masyarakat yang sebagian besar telah rutin membayar retribusi, sehingga dipastikan menuntut pelayanan yang memadai. Dari aspek sistem peraturan telah ada prospek pengelolaan non konvensional dengan adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang jelas serta telah dilakukannya studi persampahan, namun belum ada kemauan politik yang cukup baik regulator untuk melaksanakan konsep tersebut. Ditinjau dari aspek peran serta masyarakat terdapat prospek pengelolaan sampah nonkonvensional dilihat dari persepsi masyarakat yang baik terhadap pentingnya kebersihan untuk memelihara kesehatan, dan estetika lingkungan.*

**Kata kunci :** *pengelolaan sampah, pengelolaan sampah nonkonvensional*

### 1. Pendahuluan

Penduduk yang besar merupakan kekuatan tersendiri bagi suatu daerah. Kekuatan tersebut menjadi simpul dalam penyiapan infrastruktur baru, seperti pendidikan, kesehatan, serta berbagai bentuk pelayanan umum perkotaan lainnya. Selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas manusia yang menuntut meningkatnya energi yang dipergunakan telah menyebabkan bertambahnya sampah. Ini berarti penambahan jumlah penduduk di perkotaan yang

pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dan variasinya (Syafrudin, 2006:2). Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan atau peningkatan sarana dan prasarana sampah akan memunculkan permasalahan yang semakin kompleks, antara lain sampah tidak terangkut, pembuangan (sampah) liar, kota tampak kumuh, kotor dan jorok, menimbulkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit, mengurangi daya tampung sungai, menyumbat saluran drainase sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir, dan lain-lain.

**Tabel 1.** Jumlah sampah dan jumlah penduduk Bangkalan

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Sampah (m <sup>3</sup> /hari)
1.	2006	926.562	200,72
2.	2007	935.920	205,83
3.	2008	946.215	210,01
4.	2009	967.191	220.70
5.	2010	968.596	232,32

Sumber : BLH Kabupaten Bangkalan

Tabel di atas, menunjukkan timbunan volume sampah cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan pola konsumsinya. Dengan volume sampah yang terus meningkat, maka hal yang perlu mendapat perhatian dan penanggulangan khusus adalah bagaimana mengelolanya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa timbunan sampah yang paling banyak berasal dari sampah rumah tangga 84,64%, kemudian sampah pasar 2,52% dan sampah kawasan industri 2,58% (Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008:12). Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di perkotaan. Pengelolaan sampah sementara ini dipandang hanya sebagai tanggungjawab pemerintah semata. Masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat terhadap penanganan sampah menyebabkan tidak terkontrolnya jumlah sampah.

Timbunan sampah padat tidak dapat dihentikan, akan tetapi harus dikelola, dikurangi atau diminimalisasi secara baik. Pembiayaan dalam pengelolaan sampah harus secara efektif dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada umumnya pemerintah setempat hanya menyediakan tempat pembuangan sampah saja dan kurang memperhatikan bagaimana pengelolaannya sehingga bisa dimanfaatkan lagi atau mengurangi dampak yang ditimbulkan dari sampah tersebut. Karenanya, pengelolaan sampah memerlukan anggaran/biaya yang besar, terutama untuk biaya teknik operasional dari pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampai di tempat pembuangan akhir. Survey yang

diungkapkan oleh JICA (2008) menunjukkan pengelolaan sampah di Pulau Jawa baru mampu melayani 59% dari total jumlah penduduk. Dilaporkan pula bahwa tingkat pelayanan pengelolaan sampah pada tingkat nasional hanya mencapai 56%.

## 2. Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah :

1. Mengkaji kelemahan atau permasalahan yang dihadapi dan dari cara pengelolaan sampah dengan sistem yang sedang diterapkan;
2. Mengetahui prospek pengelolaan sampah non-konvensional di Kabupaten Bangkalan

## 3. Manfaat Studi

Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritik berupa kerangka pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah di masa yang akan datang.

## 4. Metode Penelitian

### 4.1 Landasan Teori

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isti Surjandari dkk (2009) dengan judul “Model Dinamis Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Beban Penumpukan”, bertujuan menganalisis sistem yang tepat dalam pengelolaan sampah menyimpulkan bahwa pengomposan sangat layak dilaksanakan, pengolahan sampah dengan *incenerator* dapat dilakukan setelah adanya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga potensi konflik dapat diredam.

## 5. Pengertian Sampah

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula (Tandjung, 1982 dalam Suprihatin, 1999).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan (Slamet,2002). Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami sampah adalah :

1. Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H<sub>2</sub>S yang bersifat racun bagi tubuh.

2. Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
3. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.

### **5.1 Sumber-sumber Sampah**

Menurut Gilbert dkk.(1996), sumber-sumber timbunan sampah adalah Sampah dari pemukiman penduduk, dari tempat – tempat umum dan perdagangan, dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, sampah dari industri, sampah pertanian.

### **5.2 Jenis-jenis sampah**

#### **5.2.1 Sampah Organik**

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Misalnya sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

#### **5.2.2 Sampah Anorganik**

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk – produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng,(Gelbert dkk, 1996).

### **5.3 Dampak Negatif**

Timbunan sampah padat banyak tidak dapat teruraikan, dan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (*refuse*) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Menurut Gilbert dkk (1996) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan terhadap keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

#### **5.3.1 Sistem Kelembagaan**

Organisasi dan manajemen disamping sebagai faktor utama dalam peningkatan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sampah, juga memiliki peranan dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan membentuk suatu institusi/organisasi, personalia dan manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Hal ini terkait dengan suatu kegiatan yang bertumpu pada teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan kondisi fisik wilayah kota serta memperhatikan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Bentuk kelembagaan yang dianjurkan untuk berbagai kategori kota di Indonesia seharusnya sesuai dengan Standar SK-SNI T-13-1990-F, dimana Kota sedang 1 (jumlah penduduk 250.000 – 500.000 jiwa) atau Ibu Kota Propinsi bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri; Kota sedang 2 (jumlah penduduk 100.000 – 250.000

jiwa) atau Kota/Kotif bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas /UPTD Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum; Kota kecil (jumlah penduduk 20.000 – 100.000 jiwa) atau kota kotif bentuk lembaga pengelolaan sampah yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas / UPTD, Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.

#### **5.4 Teknis Operasional**

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir. Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu : penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengo lahan, dilanjutkan dengan pembakaran.

##### **5.4.1 Penampungan Sampah/ Pewadahan**

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan (SNI 19-2454-2002).

##### **5.4.2 Pengumpulan Sampah**

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan/pewadahan sampah sampai ketempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu : pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002)

##### **5.4.3 Pemindahan Sampah**

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut (SNI 19-2454-2002).

##### **5.4.4 Pengangkutan Sampah**

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres (SNI 19-2454-2002)

##### **5.4.5 Pembuangan Akhir Sampah**

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman (SK SNI T-11-1991-03). Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah

perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) metode yaitu : *Open Dumping* (sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/menimbun sampah di suatu tempat), *Sanitary Landfill* (sistem pembuangan akhir sampah dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah), *Controlled Landfill* (sistem pengalihan *open dumping* dan *sanitary landfill*).

### **5.5 Aspek Hukum dan Peraturan**

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, keterlibatan masyarakat. Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bangkalan No.5 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Dati II Bangkalan dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangkalan No.9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.

### **5.6 Sistem Pembiayaan**

Dalam mengelola limbah padat/sampah membutuhkan anggaran untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dan anggaran akan bertambah lagi apabila cakupan pelayanan dirasa perlu perluasan. Pembiayaan tersebut berasal dari retribusi pelayanan, pengangkutan dan pengelolaan sampah, sehingga perlu pengaturan tarif retribusi secara benar, tata cara penarikan retribusi yang baik, karena pembiayaan operasional dan pemeliharaan diperoleh dari penarikan retribusi. Diharapkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia akan menuju pada *self financing* (pembiayaan mandiri), termasuk kemungkinan mendirikan perusahaan daerah yang mengelola persampahan, Usaha Daur Ulang dan Pengkomposan. Pemerintah Daerah wajib menentukan besarnya biaya jasa pengelolaan sampah yang dipungut dari masyarakat dan pelaku usaha dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Besarnya biaya jasa pengelolaan sampah dari masyarakat dan pelaku usaha yang akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan infrastruktur dan peralatan yang tersedia. Untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dapat juga dengan mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif.

Pembiayaan dalam pengelolaan persampahan meliputi sumber dana yang dipergunakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan daerah, besarnya anggaran yang diterima dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan sampah (biaya operasional dan pemeliharaan), dan sumber dana pengelolaan persampahan daerah berasal dari APBD dan Pembayaran Retribusi pelayanan kebersihan

#### **5.6.1 Aspek Peran Serta Masyarakat.**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat

terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat (Wibowo dan Djajawinata: 2004).

## 6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah prospek pengelolaan sampah non-konvensional di Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari 18 kecamatan dengan 281 desa/kelurahan. Pengelolaan sampah ini adalah pengelolaan sampah yang menganut konsep *zero waste* ditinjau dari aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peraturan dan aspek peran serta masyarakat.

### 6.1 Metode

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah non-konvensional.

### 6.2 Prosedur Penelitian

Perolehan informasi di lapangan, dilakukan dengan menggunakan 3 cara yaitu: 1) pengamatan, yang dilakukan terhadap situasi dan kondisi desa beserta prasarana dan sarana atau fasilitas pembuangan sampah yang dimiliki; 2) wawancara, dilakukan baik terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap baik tokoh agama/ulama atau tokoh masyarakat termasuk masyarakat setempat; 3) pengumpulan dokumen tertulis/rekaman: ini meliputi perolehan data sekunder dari SKPD terkait dan data lainnya (Pemdes, Bappeda, Kecamatan atau kelurahan, klipng surat kabar, beberapa studi awal dari daerah lain, termasuk catatan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan).

### 6.3 Penentuan Lokasi Pengamatan

Penentuan lokasi pengamatan dilakukan secara proporsional dan meliputi desa perwakilan. Penelitian ini akan dilaksanakan di seluruh desa yang menjadi sampel penelitian di kabupaten Bangkalan, yaitu sebanyak 50 desa dari 18 kecamatan yang ada.

### 6.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:

1. Data primer
2. Data sekunder

### 6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut (Sugiarto,et. al 2001). Teknik pengambilan data primer dan data sekunder dilakukan dengan wawancara, Dokumentasi, Observasi (Pengamatan), Kuesioner (Pertanyaan).

### 6.6 Kesimpulan

1. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan secara konvensional sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah, namun terkesan kurang serius penanganannya sehingga tidak efisien, biaya operasional dan kebutuhan akan TPA tinggi, sehingga ada prospek pengelolaan sampah non-konvensional.

2. Kondisi sarana serta personal dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan sangat terbatas, sehingga ada prospek pengelolaan sampah non-konvensional untuk mempertahankan kinerja dalam menghadapi beban kerja pengelolaan sampah yang terus meningkat.
3. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan belum merupakan prioritas, dana yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah masih kecil sehingga ada prospek pengelolaan sampah non-konvensional untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang telah aktif membayar retribusi kebersihan.
4. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah skala kawasan di Kabupaten Bangkalan sudah cukup bagus, sehingga ada prospek pengelolaan sampah non-konvensional, khususnya untuk skala kawasan, seperti kawasan pemukiman, perkantoran dan sekolah dan diintegrasikan dengan pengelolaan sampah konvensional yang telah ada sebelumnya.

## 7. Daftar Pustaka

- Anonim. 2004, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*, Bandung, Yrama Widya.
- Arikunto. Suharsini. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Azwar, Azrul, 1990,. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya.
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. 2010, *Laporan Timbulan Sampah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010*.
- Banglakalan Dalam Angka 2009
- Departemen Pekerjaan Umum. 1990, *Tata Cara pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan: SK SNI-T-13-1990-F*, Bandung, Yayasan LPMB.
- \_\_\_\_\_. *Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia: SKSNI S-04-1993-0*, 1993, Yayasan LPMB Bandung.
- \_\_\_\_\_. *Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah: SKSNI-03-3241-1994*, 1994, Bandung, Yayasan LPMB.
- Irman. 2005, *Evaluasi Peranserta Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Teknik Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Padang*, Tesis, Program Studi Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Semarang, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangkalan No. 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Profil Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2009
- Riyanto, Bambang. 2008. *Prospek Pengelolaan Sampah Non-Konvensional di Kota Kecil*, Tesis, Undip, Semarang.
- Santoso, Urip. 2009. *Penanganan Sampah Untuk Menuju Kota Bersih dan Sehat*.
- Sudradjat. 2007, *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta, Penebar Swadaya.
- Syafrudin. 2006, *Buku Ajar Pengelolaan Limbah Padat (Sampah) Perkotaan*, Semarang, Program Modular Magister Teknik Manajemen Prasarana Perkotaan Universitas Diponegoro.
- Umar, Ibnu. 2009. *Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Di Wilayah Perkotaan*